

ABSTRAK

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah salah satu bentuk baru dari tindak pidana pornografi, yaitu penyebarluasan materi atau konten yang bermuatan asusila tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian secara immateriil dan tidak menutup kemungkinan mengalami *secondary victimization*. Perlindungan hukum menjadi penting untuk korban salah satunya dengan penerapan hak untuk dilupakan yang termuat dalam Pasal 26(3) UU ITE. Dengan tidak adanya peraturan terkait mekanisme hak untuk dilupakan menjadikan hak ini belum dapat diimplementasikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperlukan pembentukan peraturan terkait mekanisme hak untuk dilupakan dan penyempurnaan UU Pornografi agar memuat tentang pornografi balas dendam. Sebelum dilakukan pembentukan tersebut, diperlukan pengesahan RUU Data Pribadi agar ada dasar hukum yang jelas mengenai privasi dan batasan dari data pribadi. Dengan begitu, hak korban dari tindak pidana pornografi balas dendam dapat terpenuhi dengan perlindungan hak atas privasi.

Kata kunci: Pornografi balas dendam, UU ITE, Hak Privasi, Hak Untuk Dilupakan, Pemenuhan Hak Korban, Materi Pornografi.

ABSTRACT

Revenge porn is a new form of pornographic crime, namely the dissemination of immoral material or content without the consent of the parties concerned. As a result of this action the victim suffered immaterial losses and did not close the possibility of experiencing secondary victimization. Legal protection becomes important for victims, one of which is by applying the right to be forgotten contained in Article 26(3) of the ITE Law. In the absence of regulations related to the mechanism of the right to be forgotten makes this right cannot be implemented in Indonesia.

The results of the study indicate that it is necessary to establish regulations related to the mechanism of the right to be forgotten and to improve the Pornography Law so that it contains revenge pornography. Prior to the establishment, it is necessary to ratify the Personal Data Bill so that there is a clear legal basis regarding privacy and limitations of personal data. That way, the rights of victims of the crime of revenge pornography can be fulfilled by protecting the right to privacy.

Keywords: *Revenge Pornography, ITE Law, Right to Privacy, Right to Be Forgotten, Fulfillment of Victim's Rights, Pornographic Material.*